

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Menurut (Murni, 2006) Pengeluaran pemerintah, yang dilakukan oleh pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah memberikan imbas serta akibat kepada pertumbuhan ekonomi. prinsip Keynesian membuktikan jika kontribusi pemerintah sangat penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, otonomi daerah mempercepat segenap pengelola kepentingan di pemerintahan untuk tingkatkan kemampuan perekonomian daerah. Menurut (Sukirno, 2006) Aspek penting dalam pengaruhi pertumbuhan ekonomi merupakan investasi( penanaman modal). Prinsip Harrod Domar menarangkan kalau perekonomian ingin mengalami pertumbuhan dengan cara tetap meresap dalam periode waktu panjang maka dibutuhkan penanaman modal.

Menurut peraturan menteri no 13 tahun 2006 mengenai pengelolaan keuangan daerah, pengeluaran pemerintah daerah (belanja) dikelompokan terbagi 2 yakni belanja langsung dan belanja tidak langsung. Pengeluaran pemerintah daerah mencakup belanja langsung dan belanja tidak langsung ialah tanggung jawab pemerintah kepada perekonomian yang diduga efisien. Sepanjang ini efektifitas pengeluaran pemerintah dapat dikenal dengan seberapa besar dalam nilai pertumbuhan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran pemerintah, atau lebih umumnya adalah parameter dari sektor publik, menjadi subyek besar untuk di analisis dan diperdepatkan. kontroversi menaikan dalam jangka panjang tingkat pertumbuhan ekonomi (*Long run steady state growth economy*). Secara umum

gambaran pengeluaran publik, yaitu infrastuktur fisik atau human capital, dapat mempertinggi pertumbuhan tetapi keuangan khususnya pengeluaran dapat memperlambat pertumbuhan (*Because of disincentif effect*).

Perkembangan investasi swasta dalam negara dan luar negara Indonesia dan lebih spesial di kota Ternate. Maka kekuatan aktivitas ialah sesuatu aspek yang mempengaruhi output sesuatu daerah. Angkatan kerja yang besar akan tercipta dari jumlah masyarakat yang besar. Tetapi perkembangan masyarakat dikhawatirkan akan memunculkan dampak yang kurang baik kepada pertumbuhan ekonomi. Investasi dalam perekonomian sangat berarti, sebab para penanam modal di daerah bermaksud menancapkan modalnya yang akan berakibat kepada terciptanya kesempatan kerja, terbukanya peluang kerja, alhasil berakibat dalam mengurangi tingkatan kemiskinan. Apabila investasi bertambah dalam tiap tahun maka akan berakibat yang positif untuk pertumbuhan ekonomi di daerah alhasil perekonomian mengalami perkembangan yang melonjak.

Permasalahan pengangguran dan ketenagakerjaan hingga di saat ini sedang jadi kepedulian mendasar disetiap negeri di dunia khususnya dinegara yang sedang berkembang. Kedua permasalahan itu ialah satu kesatuan yang keduanya menghasilkan dualisme kasus yang silih bertentangan antar satu dengan yang yang lain. Dualisme itu terjalin bila pemerintah tidak sanggup dalam menggunakan serta minimalkan akibat yang disebabkan dari 2 kasus itu dengan baik. Tetapi bila pemerintah sanggup menggunakan keunggulan tenaga kerja yang terdapat hingga dualisme kasus tidak akan terjalin bahkan memberikan dampak yang positif dalam percepatan pembangunan (Wijayanto & Ode, 2019).

Adapun sebaliknya bila pemerintah tidak sanggup menggunakan maka akan menghasilkan imbas negatif yakni mengganggu pertumbuhan ekonomi. Ditinjau dari sudut pandang positif tenaga kerja ialah salah satu pangkal energi yang sangat berarti dalam mendesak pertumbuhan dan perkembangan ekonomi suatu negeri. Tetapi dari sudut pandang yang lain melonjaknya tenaga kerja justru kerap kali jadi perkara ekonomi yang susah untuk dituntaskan oleh pemerintah. Sebagai dampak dari minimnya pemerintah dalam sediakan lapangan pekerjaan selaku akibat dari melonjaknya jumlah masyarakat yang terdapat, alhasil tenaga kerja yang terdapat tidak terserap dengan cara penuh, konsekuensinya terciptalah pengangguran.

Selain jadi beban dan penghalang dalam pertumbuhan perekonomian sesuatu negeri, pengangguran pula digunakan jadi salah satu indikator dari pasar tenaga kerja yang ada. Rendahnya pengangguran kerap diduga jadi sesuatu prestasi dalam sesuatu negeri demikian pula sebaliknya. Tetapi pada faktanya belum mencerminkan permasalahan ketenagakerjaan yang sesungguhnya. Rancangan pengangguran disini dimaksud selaku masyarakat yang memasuki umur kerja (15–65 tahun) yang lagi mencari kerja, menyiapkan upaya, putus asa dan telah memiliki pekerjaan tetapi belum memulai bekerja.

Kesuksesan otonomi daerah diukur menggunakan ketergantungan dan akibat dengan variabel makro ekonomi daerah. Apabila pengeluaran pemerintah, investasi, dan jumlah tenaga kerja mempengaruhi kepada pertumbuhan ekonomi hingga disebut perekonomian daerah menggapai kesuksesan. Hal ini membuktikan pertumbuhan ekonomi senantiasa jadi tujuan penting dalam menggapai tingkatan pembangunan ekonomi di daerah.

Pembangunan ekonomi pada hakekatnya merupakan sesuatu cara perubahan yang berkelanjutan dari sesuatu masyarakat ataupun sistem sosial dengan cara totalitas mengarah pada kehidupan yang lebih baik, dimana cara pembangunan bermaksud untuk meningkatkan derajat hidup kesejahteraan orang serta derajat dan derajat orang yang meliputi peningkatan bermacam barang keperluan pokok, kenaikan standar hidup dan perluasan pilihan ekonomi serta sosial untuk semua warga. Dalam hal ini kewajiban mempertinggi tingkatan kesejahteraan bukan cuma peranan pemerintah, namun juga semua elemen masyarakat. Oleh karena itu pemerintah wajib dapat mendesak serta memberdayakan semua komponen masyarakat, khususnya bagian swasta, guna berperan lebih besar dalam tingkatkan kesejahteraan warga.

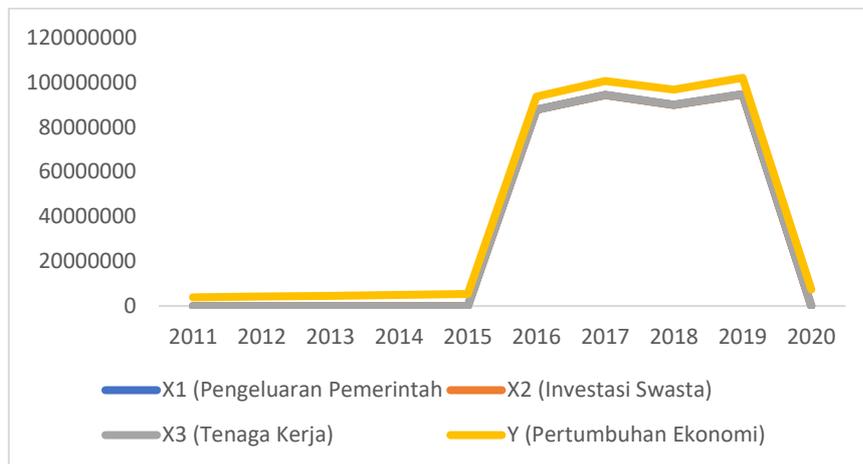
Pertumbuhan ekonomi berhubungan erat dengan cara peningkatan penciptaan barang dan jasa dalam aktivitas ekonomi masyarakat. Menurut Schumpeter (1939) Pertumbuhan ekonomi bisa diartikan pula sebagai peningkatan output masyarakat yang dikarenakan oleh terus menjadi banyaknya faktor penciptaan yang dipergunakan dalam cara produksi tanpa terdapat pergantian cara- cara ataupun teknologi itu sendiri. Indikator pertumbuhan ekonomi tidak cuma mengukur tingkatan Pertumbuhan output dalam sesuatu Perekonomian, tetapi sebetulnya pula memberikan indikasi mengenai sejauh mana kegiatan Perekonomian yang terjalin pada suatu rentang waktu tertentu telah menciptakan pendapatan untuk masyarakat .

Kemampuan otonomi daerah memiliki arti jika daerah kabupaten dan kota, yang terletak di kawasan Indonesia diserahkan wewenang dan tanggung jawab dalam mengatur keuangan daerah sesuai kepentingan daerah masing-masing. Meski sumber pendanaan aktivitas pemerintahan dan pembangunan

daerah sebagian besar berasal dari APBN ataupun penguasa pusat lewat Dana Alokasi Umum( DAU), Dana Alokasi Khusus( DAK) dan Dana Bagi Hasil( DBH), pemerintah daerah diberikan wewenang untuk mendapatkan pendapatan daerah lewat pajak dan retribusi daerah dalam Pendapatan Asli Daerah. Pengeluaran pemerintah, oleh pemerintah pusat serta pemerintah daerah memberikan efek dalam pertumbuhan ekonomi.

Filosofi Keynesian berpikiran andil pemerintah sangat besar dalam menghasilkan pertumbuhan ekonomi. Menurut (Murni, 2006) Dalam pembangunan diharapkan terbentuknya perkembangan. Untuk menggapai target itu dibutuhkan sarana dan infrastruktur, paling utama dorongan anggaran yang layak. Disinilah kedudukan investasi memiliki peran yang berarti sebab sesuai dengan tugasnya selaku penggerak pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Sedangkan tujuannya untuk mendukung penerapan pembangunan nasional dalam rangka menaikkan pemerataan pertumbuhan ekonomi dan kestabilan ekonomi nasional yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Investasi menghimpun modal dengan membuat beberapa gedung dan perlengkapan yang bermanfaat untuk produktifitas, hingga output sesuatu daerah akan meningkat serta pertumbuhan ekonomi dalam waktu panjang serta melonjak. Kota Ternate yang diketahui selaku kota jasa, perekonomiannya sangat terkait baik itu Perhotelan sampai pada sarana transportasi ataupun perusahaan agro( kelompok) dan perusahaan yang lain. Investasi di Kota Ternate terdiri dari investasi dalam negara ataupun investasi dari luar negara( PMDN dan PMA).

**Gambar 1.1. Realisasi Pengeluaran Daerah, Investasi Swasta, Tenaga Kerja dan Pertumbuhan Ekonomi Di Kota Ternate Tahun 2010-2020**



*Sumber BPS Kota Ternate 2010-2020*

Berdasarkan Gambar 1.1, terlihat bahwa Realisasi penerimaan dan pengeluaran pemerintah provinsi adalah realisasi/perhitungan APBD provinsi pada tiap tahun anggaran. pengeluaran pemerintah merupakan salah satu aspek penggunaan sumber daya ekonomi yang secara langsung dikuasai dan dimiliki oleh pemerintah dan langsung dimiliki oleh masyarakat melalui pembayaran pajak, Pada tahun 2019 Realisasi pengeluaran pemerintah di Kota ternate sebesar 94,660,846. pelaksanaan program-program dan kebijakan pemerintah tidak terlepas dari ketersediaan dana yang tertuang anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBN).

Berdasarkan gambar di atas penulis merasa tertarik untuk mengkaji sejauh mana pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Investasi Swasta dan Tenaga Kerja terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Ternate selama Sepuluh tahun terakhir 2010-2020.

Berdasarkan Gambar 1.1, terlihat bahwa pembentukan modal tetap bruto (PMTB) mencakup pengadaan, pembuatan, dan pembelian barang modal, Lihat

pada tahun 2019 Sebesar 1,365,223,04 dengan jumlah yang besar. Barang modal dimaksud adalah barang-barang yang digunakan untuk proses produksi, tahan lama atau yang mempunyai umur pemakaian lebih dari satu tahun seperti bangunan, mesin-mesin dan alat angkutan.

Berdasarkan Gambar 1.1, terlihat bahwa angkatan kerja adalah penduduk usia kerja yang bekerja, punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran Dapat Dilihat pada tahun 2020 dengan jumlah 102,906. Bekerja adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan dan lamanya bekerja paling sedikit 1 jam secara terus menerus dalam seminggu yang lalu termasuk pekerja keluarga tanpa upah yang membantu dalam suatu usaha/kegiatan ekonomi.

Berdasarkan Gambar 1.1, terlihat bahwa produk domestik bruto pada tingkat nasional serta produk domestik regional bruto (PDRB), Pada tingkat regional (Provinsi) menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan nilai tambah pada suatu waktu tertentu untuk menyusun PDB maupun PDRB digunakan 2 pendekatan yaitu, lapangan usaha dan pengeluaran keduanya menyajikan komposisi data nilai tambah dirinci menurut sumber kegiatan ekonomi (Lapangan usaha) dan menurut komponen penggunaannya PDB maupun PDRB dari sisi lapangan usaha merupakan penjumlahan seluruh komponen nilai tambah bruto yang mampu diciptakan oleh sektor-sektor ekonomi atas berbagai aktiitas produksinya. sedangkan dari sisi pengeluaran menjelaskan tentang penggunaan dari nilai tambah tersebut. Dilihat pada tahun 2019 dengan jumlah PDRB yang besar 7.286.007,20 dalam bentuk persen 8,16 Salah satu indikator ekonomi berdasarkan pendekatan makro ekonomi adalah nilai Produk

Domestik Regional Bruto (PDRB) yang merupakan output (Barang dan Jasa) dari perekonomian pada suatu wilayah yang diukur secara periodik (tahunan).

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah antara lain sebagai berikut:

1. Apakah pengeluaran pemerintah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Ternate?
2. Apakah investasi swasta berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Ternate?
3. Apakah tenaga kerja berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Ternate?
4. Apakah pengeluaran pemerintah, investasi swasta dan tenaga kerja secara simultan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Ternate?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penulis memperoleh gambaran untuk ditetapkan tujuan penelitian antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Ternate
2. Untuk mengetahui pengaruh investasi swasta terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Ternate
3. Untuk mengetahui pengaruh tenaga kerja, terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Ternate

4. Untuk mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah, investasi swasta dan tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Ternate

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan rancangan penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat Penelitian, baik secara akademik maupun secara praktis antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat praktis bagi pemerintah di Kota Ternate, dan instansi pemerintahan terkait, penelitian ini juga dapat memberikan sumbangsi atau solusi untuk memajukan dan meningkatkan ekonomi di Kota Ternate.
2. Penelitian ini juga diharapkan memberikan sumbangsi dalam menyelesaikan masalah-masalah ekonomi yang belum terselesaikan di Kota Ternate
3. Manfaat secara akademik penelitian ini, sebagai bahan dan diharapkan akan memperkaya wacana keilmuan terutama tentang Pengaruh pengeluaran pemerintah, Investasi Swasta dan Tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Ternate sebab penulis merasa wacana investasi yang berdampak pada pertumbuhan disektor jasa masih sangat minim dalam ranah akademik, terutama di Kota Ternate olehnya itu penulis merasa sumbangsi ini adalah langkah kecil untuk memperkaya wacana keilmuan.